

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMASALAHAN PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK PADA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Fhany Yunita

(1487040)

Pelaksanaan pembangunan salah satunya diperlukan ialah pengadaan barang/ jasa pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Bagaimana penjelasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagaimana pembatalan pemutusan kontrak sepihak menurut KUHPer dan Peraturan Pemerintah. Akibat hukum dari pemutusan kontrak sepihak pada kontrak pengadaan barang dan jasa dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan Penelitian kepustakaan atau dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan komparatif yakni melakukan penelitian terhadap peraturan yang sudah ada khususnya mengenai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan semua pihak. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan, dengan mengikuti prosedur dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang merupakan sistem hukum yang tersusun secara sistematis dan tertulis. Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sudah dapat mengakomodir kepentingan para pihak. Peraturan Presiden mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi yang melanggar dan disesuaikan dengan kesalahannya. Dalam proses pembuktian para pihak harus menyelesaikannya melalui jalur pengadilan.

Kata Kunci : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengadaan Barang/Jasa.

ABSTRACT

JUDICIAL REVIEW AGAINST THE PROBLEM OF TERMINATION OF THE CONTRACT UNILATERALLY ON THE CONTRACT FOR THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES ASSOCIATED WITH THE PRESIDENTIAL REGULATION NO. 16 THE YEAR 2018 ABOUT THE PROCUREMENT OF GOVERNMENT GOODS AND SERVICES

Fhany Yunita

(1487040)

The development of the country implemented by the government. The implementation of the development requires the procurement of goods/services. Procurement of government goods/services financed by the State budget or the budget of income and expenditure. Procurement of goods/services of the government done by way of auction and appointment.

This is a normative juridical research or also called library Research or documents. This research is descriptive analytical, using a comparative approach that is to do the research on the existing regulations, especially regarding information and electronic transactions. Data collection was done by literature study. The Data used are secondary data consists of primary legal materials, secondary, and tertiary. After the data is collected, and then analyzed qualitatively.

Research shows that the implementation of the procurement of government goods/services can be done all parties. The implementation of government goods/services procurement should be implemented, effectively and efficiently, with the principle of healthy competition, transparent, open, and fair treatment for all parties. Indonesia adheres to the legal system "civil law" which is a system of laws systematically arranged and written. Regulation of the President governing and load about the basic principles in the procurement of goods and services. Presidential regulation more specifically from the Book of Law Civil Law nonetheless the content should not be contradictory. The witness given relatively different and adapted to his guilt.

Keywords : Local Government Center, Local Government, Procurement Of Goods/Services.

DAFTAR ISI

COVER	
<u>PERNYATAAN KEASLIAN</u>	i
<u>PENGESAHAN PEMBIMBING</u>	ii
ABSTARK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	25
PENGERTIAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TENDER DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA.....	25
A. Pengertian perikatan dan asas-asas dalam Perikatan.....	25
B. Lahir dan Batalnya sebuah Perikatan.....	32
C. Prinsip dan Etika dalam Pengadaan Barang atau Jasa.....	39
D. Pihak Terkait dalam pengadaan dan perencanaan pengadaan.....	45
BAB III.....	55

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM MELAKUKAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.....	55
A. Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak.....	55
B. Perihal Resiko, Wanprestasi dan keadaan memaksa.....	63
C. Jenis Kontrak pengadaan Barang.....	66
D. Pelaksanaan, Perubahan dan Penyesuaian.....	70
BAB IV.....	77
PEMBAHASAN.....	77
A. Pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	77
B. Pemutusan kontrak sepihak menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	95
C. Akibat hukum pemutusan kontrak sepihak pada kontrak pengadaan barang dan jasa dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	101
BAB V.....	107
PENUTUP.....	107
A. KESIMPULAN.....	107
B. SARAN.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
MATRIX.....	114